



ISSN 2963-1602

Volume 1 Nomor 01 Bulan Juni Tahun 2022

**JURNAL ILMIAH KOORDINASI**

Dikirim penulis 12-06-2022, Diterima: 27-06-2022 Dipublikasi: 28-06-2022

## PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Roni Arisandi

Program Magister Ilmu Administrasi Negara STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail: [roni2020arisandi@gmail.com](mailto:roni2020arisandi@gmail.com)

### Abstrak

Pelaksanaan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan langkah penting bagi Pemerintah agar dampak yang ditimbulkan tidak lebih besar lagi yang dapat merugikan masyarakat maupun perekonomian. Pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya berbagai hambatan dalam mencapai keberhasilan tujuan kebijakan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menganalisis secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Dari hasil penelitian menunjukkan banyak faktor yang menghambat terhadap keberhasilan tujuan kebijakan, diantaranya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, dan kurangnya pengawasan dalam pelaksana kebijakan untuk memberikan sanksi secara nyata terhadap masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Implementasi kebijakan dan protokol kesehatan

### Abstract

*The implementation of Covid-19 prevention and control efforts is an important step for the government so that the impact is not greater and can harm the community and the economy. In fact, the implementation of the policies has not proceeded efficiently due to many influencing factors so that there are various obstacles to achieving the policy goals. The study used qualitative methods with the aim of in-depth analysis of supporting and inhibiting factors for successful implementation of policies regarding public health protocols in public places and facilities in the prevention and control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) at Sukamaju Kidul Indihiang, Tasikmalaya City. The results of the study show that there are many factors that hinder the achievement of policy goals, including economic factors that encourage people to carry out activities to meet their needs by not implementing health protocols, and the lack of supervision in the implementation of policies to provide real sanctions to those who do not comply with the provisions enacted apply.*

*Keywords: Implementation of health policies and protocols*



## PENDAHULUAN

Merebaknya virus Corona 2019 (Covid-19) telah berdampak kepada berbagai aspek kehidupan manusia di berbagai belahan dunia saat ini. Setiap negara terus berupaya melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan pengendaliannya agar tidak menjadi lebih buruk bagi kehidupan dan ekonomi masing-masing. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan melibatkan berbagai ahli kesehatan telah mengupayakan untuk dengan segera dapat melakukan pengendalian dan pengobatannya dan memberikan berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh setiap negara.

Pemerintah Indonesia sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan dan mengobati yang terkena penyakit virus Corona 2019 (COVID-19). Penyebaran yang dimulai pada awal tahun 2020, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian dengan berbagai kebijakan dan langkah agar penyebarannya tidak meluas, dari sumber data tentang covid-19 di Indonesia per tanggal 3 Juli 2022 diketahui 6.092.303 orang status positif, sembuh 5.918.643 orang dan meninggal dunia sebanyak 156.745 orang (<https://covid19.go.id/>).

Pemerintah dalam menanggapi wabah COVID-19 tidak serta merta dapat melaksanakan berbagai pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan yang merupakan subjek pembangunan tetap menjadi perhatian penting. Masyarakat sendiri dalam menghadapi tantangan yang muncul saat ini membutuhkan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kekurangan vaksin dan pengobatan definitif untuk COVID-19 diperkirakan akan memperpanjang masa pandemi, sehingga pemerintah harus menyiapkan keseimbangan baru dalam kehidupan masyarakatnya dan dapat melakukan vaksinasi kepada semua warga negara. Aspek kesehatan, sosial dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, berbagai kebijakan yang ditujukan untuk percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlanjutan ekonomi dan aspek sosial masyarakat.

Tempat dan fasilitas umum merupakan ruang dimana masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Risiko pergerakan orang dan pertemuan masyarakat di tempat dan fasilitas umum merupakan potensi yang signifikan untuk penularan COVID-19. Agar roda perekonomian tetap berputar, perlu dilakukan mitigasi terhadap dampak pandemi COVID-19, terutama di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat perlu melakukan perubahan gaya hidup dengan pengaturan baru dan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19.

Disiplin dalam menerapkan prinsip hidup bersih dan sehat menjadi kunci menekan penularan COVID-19 di masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 segera berakhir. Sebagaiupayanya, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan sebuah keputusan bernomor

HK.01.07/Menkes/382/2020, yaitu terkait dengan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan tersebut memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru



selama masa pandemi.

Ruang lingkup protokol kesehatan ini mencakup upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan tempat umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik kritis perlindungan kesehatan masyarakat, dengan melibatkan pengelola, penyelenggara atau pejabat. Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan, dan telah melaksanakan pembentukan pokja penanganan Covid-19.

Sebagai langkah praktis, Gugus Tugas Covid-19 juga telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan penularan penyakit virus corona 2019 (Covid-19) di Kota Tasikmalaya, namun dalam pelaksanaannya kurang mendapat perhatian masyarakat. misalnya kasus yang terjadi di Desa Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang. Kota Tasikmalaya yang masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, dimana dari data yang diperoleh per 26 Juli 2021 menunjukkan jumlah terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 20 orang, dengan jumlah kasus meninggal hingga 11 orang atau mencapai tingkat kematian 55%, hal tersebut menunjukkan dalam mengimplementasikan peraturan yang berlaku belum berjalan dengan baik.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan keputusan yang biasanya dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Istilah kebijakan publik secara umum berupa keputusan pemerintah atau kebijakan publik dapat berasal dari usulan oleh individu, kelompok atau pemerintah itu sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, individu dan kelompok seringkali berusaha membentuk kebijakan publik melalui pendidikan, advokasi, atau mobilisasi kelompok kepentingan.

Kebijakan publik umumnya dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga dapat dikahatakan sebagai produk hukum Pemerintah. Istilah kebijakan secara umum merupakan keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya. Definisi kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan (Abidin, 2012) mengemukakan: "Kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik".

Kebijakan merupakan tugas pengambilan keputusan intelektual yang mencakup penjelasan tujuan, menganalisis situasi, proyeksi pengembangan dan penelitian masa depan, evaluasi dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan yang akan terjadi. Kebijakan sebagai pilihan yang dapat dibuat untuk tujuan pemecahan masalah atau masalah yang dihadapi. Menurut Anderson (Wahab, 2008) dengan menyatakan: "Kebijakan adalah prilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu".

Setiap kebijakan yang dibuat harus dapat diimplementasikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Pelaksanaan suatu kebijakan harus disertai dengan prosedur atau langkah-langkah yang jelas dan rinci untuk memudahkan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Menurut Udoji (Wahab, 2008) mendefinisikan tentang implementasi kebijakan dengan menyatakan: "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan



ISSN 2963-1602

Volume 1 Nomor 01 Bulan Juni Tahun 2022

**JURNAL ILMIAH KOORDINASI**

Dikirim penulis 12-06-2022, Diterima: 27-06-2022 Dipublikasi: 28-06-2022

sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip jika tidak diimplementasikan”.

Implementasi kebijakan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses kebijakan dan jika tidak dilaksanakan sesuai rencana, kebijakan menjadi tidak berguna. Menerapkan suatu kebijakan bukanlah hal yang mudah, banyak hal yang perlu diperhatikan agar tujuan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kebijakan publik sebenarnya apa dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan apa yang ingin dilakukan atau dikatakan oleh pemerintah, dimana kebijakan negara bersifat positif dalam artian merupakan suatu bentuk tindakan pemerintah terhadap suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti keputusan oleh pemerintah. Keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Berdasarkan penelitian terhadap penerapan protokol kesehatan di Kampung Tangguh Semeru.

Perumahan Mastrip di Kabupaten Jember menunjukan rotokol kesehatan telah dilaksanakan dengan baik, yang dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adanya kesadaran masyarakat, petugas keamanan ketersediaan pangan, keamanan lingkungan dan berbagai inovasi yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 (Fariha Mariroh, 2020).

Isu kebijakan publik semakin sering menjadi perbincangan, hal tersebut menjadi hal positif di era perkembangan demokrasi dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat agar kebijakan lebih berpihak pada kepentingan publik. Winarno menyatakan “Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan baik melalui prosedur atau prosedur yang jelas agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur,



ISSN 2963-1602

Volume 1 Nomor 01 Bulan Juni Tahun 2022

**JURNAL ILMIAH KOORDINASI**

Dikirim penulis 12-06-2022, Diterima: 27-06-2022 Dipublikasi: 28-06-2022

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012)”.

Para ahli telah membuat model yang dapat mencapai keberhasilan sebuah kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008) mengembangkan model dengan istilah “*A framework for implementation analysis*”, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika 1) suatu masalah dapat dikendalikan; 2) implementasi dilakukan secara tepat dan terstruktur; dan 3) tujuan kebijakan didukung oleh berbagai variabel politik secara langsung.

Model implementasi kebijakan selanjutnya dikembangkan oleh Meter dan Horn (Agustino, 2008, hal. 142) meliputi:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Implementasi kebijakan desentralis sangat bergantung pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005), faktor-faktor tersebut diantaranya “keadaan lingkungan, ikatan antar organisasi, sumberdaya konfigurasi untuk implementasi program, dan karakteristik dan kapabilitas agen penyelenggara”. Setiap model yang disampaikan oleh para ahli memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mencapai keberhasilan sebuah kebijakan, dan tidak ada satupun model yang dapat menjamin keberhasilan implementasi kebijakan secara sempurna sesuai dengan tujuan kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan strategi, proses, atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data atau bukti untuk dianalisis guna menemukan informasi baru atau menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik. Jenis penelitian menggunakan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang tidak terkuantifikasi, yang pada dasarnya dilakukan secara deskriptif dan terperinci, dengan tujuan menganalisis secara mendalam terhadap fenomena atau masalah-masalah yang terjadi.

Sebuah kategorisasi populer dan berguna memisahkan metode kualitatif menjadi lima kelompok yaitu etnografi, narasi, fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus. Penelitian ini termasuk ke dalam studi kasus yaitu menganalisis secara mendalam terkait dengan implementasi kebijakan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam studi kasus di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, verifikasi dan penatikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan berbagai upaya agar tidak mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu kelurahan yang menjadi studi dalam penelitian ini yaitu Kelurahan Sukamaju Kidul yang masuk dalam wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Kecamatan Indihiang menjadi salah satu pusat ekonomi yang menjadikan banyaknya kegiatan masyarakat terlibat didalamnya. Geliat dan pergerakan ekonomi saat ini, yang pastinya melibatkan pergerakan masyarakat umum, memerlukan daya dan upaya sehingga penyebaran covid-19 tidak lagi merebak ke daerah-daerah sekitar yang diakibatkan kurang disiplinnya masyarakat.

Beberapa aspek penting dalam mencapai keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19, kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang dapat di analisis dari studi yang terjadi di Kelurahan Sukamaju Kidul sesuai dengan latar belakang penelitian, diantaranya dari faktor pelaksanaan yang sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan. Standar umum dalam upaya pengendalian covid-19 yaitu masyarakat wajib menerapkan 5 M, yaitu mencuci tangan, penggunaan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi terhadap aktivitas atau mobilitasnya.



ISSN 2963-1602

Volume 1 Nomor 01 Bulan Juni Tahun 2022

**JURNAL ILMIAH KOORDINASI**

Dikirim penulis 12-06-2022, Diterima: 27-06-2022 Dipublikasi: 28-06-2022

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, masyarakat masih kurang disiplin dalam menerapkan 5 M tersebut, dimana cuci tangan sudah jarang dilakukan, penggunaan masker, menjaga jarak dengan orang lain, terjadinya kerumunan di titik-titik tertentu seperti pasar, pinggir jalan raya dan melakukan berbagai aktivitas yang terutama didorong oleh adanya kebutuhan hidup yang menjadikan masyarakat melupakan ketentuan tersebut, sementara kebijakan tersebut belum benar-benar dicabut, dan masih adanya beberapa temuan masyarakat yang masih terjangkit oleh covid-19.

Faktor kurangnya disiplin masyarakat merupakan kurangnya sumber daya yang dimiliki, baik tingkat pengetahuan masyarakat, kemampuan ekonomi dan daya ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pengendaliannya, ketersediaan informasi terbaru dari petugas kesehatan tentang covid-19 di daerah. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan sebuah kebijakan, baik terkait dengan sasaran kebijakan maupun terkait dengan pelaksana kebijakan, serta perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dalam mencapai keberhasilan tujuan kebijakannya.

Kelurahan Sukamaju Kidul berpenduduk sebanyak 7.335 orang, dengan sebagian besar penduduk bergerak di bidang swasta, dengan jumlah buruh harian sebanyak 987 orang, dan wiraswasta sebanyak 756 orang sehingga lebih memungkinkan mobilitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dukungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat penting dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat dalam melaksanakan kebijakan, disamping dukungan terhadap pelayanan kesehatan bagi yang terdampak, termasuk memenuhi vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan informasi terhadap perkembangan yang terjadi terkait dengan covid-19 juga perlu disampaikan oleh petugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak terlena dengan mengabaikan 5 M.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan jumlah terkonfirmasi covid-19 per tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 19.572 orang,, sebanyak 6 orang status aktif, meninggal dunia sebanyak 601 orang, sementara data yang sembuh dari covid-19 sebanyak 18.965 orang. Perkembangan yang terjadi sangat penting, dimana informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui <https://mikotas.tasikmalayakota.go.id/>, yang menunjukkan Pemerintah Kota Tasikmalaya terus menerus memberikan informasi dengan baik, namun demikian untuk petugas lapangan atau satuan tugas covid-19 sudah lagi melakukan berbagai kegiatan sebagaimana sebelumnya dilakukan, dimana perkembangan covid-19 sudah dianggap melandai, namun demikian harus tetap dilakukan pengawasan sehingga dapat tetap terkendali dengan baik.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan diperlukan adanya kemauan, sikap yang baik dari setiap pelaksana kebijakan. Daya tanggap dan respon terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan menjadi sangat penting. Berkaitan dengan pengendalian covid-19, dimana protokol kesehatan belum benar-benar dicabut, seharusnya para pemangku kebijakan tetap melakukan pengawasan dan melakukan tindakan kepada masyarakat yang tidak disiplin dalam menerapkan 5 M, sehingga penyebaran covid-19 tetap terkendali, dikarenakan ada jaminan bahwa covid-19 benar-benar sudah hilang. Diperlukan komitmen kembali diantara pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

Meskipun perkembangan penyebaran covid-19 relatif melandai, para pelaksana kebijakan atau satuan tugas, terutama di tingkat kelurahan Sukamaju Kidul masih perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan masyarakat supaya tidak terlena. Para petugas kelurahan perlu meningkatkan komunikasi dengan melibatkan para RT/RW, para Kader Posyandu serta Karang Taruna, dimana hal tersebut sebagai cara untuk tetap menjaga dan memotong rantai penyebaran Covid-19. Komunikasi sangat penting dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi Satgas tingkat kelurahan dengan kecamatan dan dengan Satgas tingkat kota, sehingga penyebaran covid-19 tetap terkendali dengan baik.

Pada dasarnya mengurangi angka penyebaran dan penularan Covid-19 bukanlah hal yang mudah karena siapa pun pasti bisa terpapar Covid-19 jika tidak menjaga kebersihan dan memakai masker saat berada di luar rumah atau saat berhadapan langsung dengan orang lain. Berbagai upaya terus dilakukan oleh para pakar kesehatan dan masyarakat untuk menghentikan maraknya virus Covid-19. Faktor yang mempengaruhi diantaranya lingkungan sosial masyarakat, dimana pada umumnya masyarakat belum terbiasa dengan menggunakan masker dalam setiap aktivitasnya. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong terhadap ketidakdisiplinan masyarakat dikarenakan tuntutan kebutuhan



ISSN 2963-1602

Volume 1 Nomor 01 Bulan Juni Tahun 2022

**JURNAL ILMIAH KOORDINASI**

Dikirim penulis 12-06-2022, Diterima: 27-06-2022 Dipublikasi: 28-06-2022

hidup sehingga tetap melakukan aktivitasnya, hal tersebut belum mencukupinya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam mencapai keberhasilan sebuah kebijakan diperlukan adanya berbagai dukungan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sampai dengan pemerintahan kelurahan dalam bentuk bantuan pangan, serta pemerataan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya partisipasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan, dimana masyarakat perlu mengetahui dan memahami tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Pemerintah sebagai pembuat kebijakan demi kebaikan bersama, dengan mematuhi berbagai peraturan yang telah dibuat. Pemberian sanksi terhadap masyarakat yang kurang disiplin masih kurang sehingga menjadikan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif.

#### KESIMPULAN

Keberhasilan implementasi kebijakan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam studi kasus di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ditentukan oleh faktor standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Fariha Mariroh, D. (2020). Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Kampung Tangguh Semeru Perumahan Mastrip Kabupaten Jember. *Multidisciplinary Journal*, 3. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/multijournal/article/view/23680>
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.